

PENDIDIKAN POLITIK OLEH KADER PDI PERJUANGAN PROVINSI RIAU

TAHUN 2015-2016

Oleh : Benedicto Solleander Heatubun

Pembimbing : Drs. M.Y. Tiyas Tinov, M.Si

Email and Phone : Bsolleander@gmail.com / +628 1378 4643 79

Ilmu Pemerintahan

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik – Universitas Riau

Kampus Bina Widya Km. 12,5 Simpang Baru-Pekanbaru 28293

Telp (0761,63277,23430)

Abstract

After the reformation in Indonesia in 1998 the life of the Indonesian nation has undergone many changes, one of them in the political field, where for 32 years under the authoritarian government of an authoritarian new order. The change was marked by the amendment of the 1945 Constitution four times in the period 1999 to 2002. The existence of the amendment impact on political freedom, among others, with the birth of new political parties both ideologically religious and nationalist. The election participants in 1999 differed markedly from the election during the New Order period, during which the New Order period was only followed by two political parties (PDI and PPP) as well as one Golongan Karya (GOLKAR) and in the 1999 election followed by 48 old political parties as well new. As a democratic country, the presence of a political party is a necessity, in which its presence is expected to become a channel for the aspirations of society, the balance of political power and as a means of criticizing and controlling the ruling government. However, with many political parties, it is not uncommon for clashes of political interests between parties, so the tendency of political parties to focus more on the interests of their own party and forget its main function as channeling the aspirations of the people.

Political education is a very important agenda. Because in carrying out the development of a nation requires a requirement for the political education of the people. The politically-educated citizen is a citizen, so he can consciously participate independently or indirectly in the development process. The presence of political parties can be seen in its role in passing political education to the people. With the political education of the community it is possible to have an ideal political culture, namely awareness to support the political system and also provide criticism and correction

Keywords : Political education, political parties, PDI Perjuangan

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Setelah terjadi reformasi di Indonesia pada tahun 1998 kehidupan bangsa Indonesia mengalami banyak perubahan, salah satunya di bidang politik, dimana selama 32 tahun di bawah kungkungan pemerintahan orde baru yang otoriter. Perubahan itu ditandai dengan diadakannya amandemen UUD 1945 sebanyak 4 kali dalam kurun waktu tahun 1999 sampai 2002. Adanya amandemen itu berimbas terhadap kebebasan berpolitik, antara lain dengan lahirnya partai politik baru baik yang berideologikan agama maupun nasionalis. Peserta pemilu pada tahun 1999 jauh berbeda dengan pemilu pada masa orde baru, di mana pada masa orde baru hanya diikuti oleh dua partai politik (PDI dan PPP) serta satu Golongan Karya (GOLKAR) dan pada pelaksanaan pemilu 1999 diikuti oleh 48 partai politik lama maupun baru. Sebagai negara demokratis, kehadiran partai politik adalah suatu keniscayaan, dimana kehadirannya diharapkan dapat menjadi penyalur aspirasi masyarakat, penyeimbang kekuatan politik serta sebagai sarana pengkritik dan kontrol terhadap pemerintah yang berkuasa. Namun dengan banyaknya partai politik tidak jarang terjadi benturan-benturan kepentingan politik antar partai, sehingga kecenderungan partai politik lebih fokus mengurus kepentingan partainya saja dan melupakan fungsi pokoknya sebagai penyalur aspirasi rakyat.

Salah satu fungsi partai politik adalah melakukan pendidikan politik bagi warga negara. Pendidikan politik diharapkan dapat menjadi sarana bagi terwujudnya masyarakat yang memiliki pengetahuan mengenai persoalan politik serta memahami hak dan kewajibannya sebagai warga negara. Pendidikan politik diperlukan bukan saja bagi para pemilih yang kurang atau belum memiliki pemahaman tentang persoalan politik tetapi juga bagi para pemilih yang sudah memiliki pengetahuan tentang

persoalan politik. Hal demikian disebabkan sikap apatis terhadap kegiatan politik yang mungkin muncul dari kalangan masyarakat yang memiliki pengetahuan politik, dikarenakan adanya kekecewaan serta frustrasi terhadap sistem politik yang ada. Kondisi seperti ini memunculkan kalangan masyarakat yang apatis dan bahkan tidak menggunakan hak pilihnya dalam pemilihan umum.

Miriam Budiardjo dalam bukunya yang berjudul *Dasar Dasar Ilmu Politik* menyebutkan bahwa partai politik adalah suatu kelompok yang terorganisir yang anggota-anggotanya memiliki orientasi, nilai-nilai dan cita-cita yang sama. Tujuan kelompok ini ialah untuk memperoleh kekuasaan politik dan merebut kedudukan politik, biasanya dengan cara konstitusional, untuk melaksanakan kebijaksanaan-kebijaksanaan yang telah mereka tetapkan. Pada konteks ini, dapat dilihat bahwa partai politik merupakan sarana atau wadah bagi masyarakat untuk berkumpul, menyalurkan aspirasi serta pendapat politik yang memungkinkan untuk membangun negara.

Ramlan Surbakti dalam bukunya *Memahami Ilmu Politik* menyatakan bahwa fungsi utama partai politik adalah mencari dan mempertahankan kekuasaan guna mewujudkan program-program yang disusun berdasarkan ideologi tertentu. Namun selain untuk mencari dan mempertahankan kekuasaan, partai politik juga memiliki peranan penting sebagai sarana sosialisasi politik (*instrument of political socialization*) dalam suatu kehidupan bernegara. Secara harfiah, sosialisasi berarti upaya memasyarakatkan sesuatu menjadi dikenal, dipahami, serta dihayati oleh masyarakat. Sedangkan sosialisasi politik ialah proses pembentukan sikap dan orientasi politik para anggota masyarakat

Pada Undang Undang Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Partai Politik telah disebutkan secara jelas pada Pasal 1 ayat 4 bahwa pendidikan politik adalah proses pembelajaran dan pemahaman tentang hak, kewajiban dan tanggung jawab setiap warga negara dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Pendidikan secara mendasar adalah suatu proses untuk mencerdaskan kehidupan bangsa sehingga apapun bentuk dan jenisnya tidak dapat dilepaskan dari misi tersebut. Hal ini juga selaras dengan yang disampaikan oleh Alfian (dalam Ahdiyana, 2009) bahwa pendidikan politik merupakan sebuah usaha sadar untuk proses sosialisasi politik masyarakat sehingga mereka memahami dan menghayati nilai-nilai yang terkandung dalam sistem politik ideal yang hendak dibangun.

Hal ini menjadikan pentingnya pendidikan politik (*political education*) bagi rakyat. Dengan kata lain pendidikan politik memiliki makna yang penting dan strategis dalam rangka mendorong warga negara (pemilih) untuk memiliki pengetahuan politik yang memadai.

1.2 Rumusan Masalah

Dari pemaparan diatas maka masalah penelitian dapat dirumuskan dalam bentuk pertanyaan sebagai berikut :

Mengapa pendidikan politik PDI Perjuangan Provinsi Riau kurang optimal?

1.3 Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini yaitu mengetahui sebab-sebab kurang optimalnya pendidikan politik bagi kader oleh PDI Perjuangan Provinsi Riau tahun 2015-2016.

2. Manfaat Penelitian

Manfaat dari penelitian ini adalah

a. Manfaat teoritis

Hasil penelitian diharapkan dapat memberikan wawasan ilmu pengetahuan dalam pendidikan politik bagi kader oleh PDI Perjuangan Provinsi Riau tahun 2015-2016.

b. Manfaat praktis

Hasil penelitian diharapkan dapat menjadi bahan referensi dan pengetahuan bagi semua pihak yang memerlukan bahan untuk perbandingan penelitian yang sama selanjutnya.

1.4 Tinjauan Pustaka

Bertitik tolak pada permasalahan yang telah diuraikan sebelumnya, maka dianggap perlu untuk mengemukakan teori yang dianggap relevan dengan permasalahan yang akan dikaji.

1. Partai Politik

Dalam Negara yang menganut sistem demokrasi, partai politik merupakan instrumen penting bagi masyarakat. Partai politik dapat menjadi wadah bagi masyarakat untuk berkompetisi dan mengendalikan sistem politik suatu negara melalui penguasaan politik yang ada. Penguasaan jabatan politik tersebut diraih melalui mekanisme pemilihan umum yang diikuti oleh partai politik. Selain hal tersebut partai politik harus mampu mengartikulasikan kepentingan aspirasi masyarakat dalam mempengaruhi kebijakan politik.

Secara sederhana partai politik dapat diartikan sebagai perkumpulan (segolongan orang-orang) yang seases, sehaluan, setujuan (terutama

di bidang politik). Namun secara umum partai politik adalah suatu kelompok yang terorganisir yang anggota anggotanya mempunyai orientasi, nilai nilai dan cita cita yang sama. Tujuan kelompok ini adalah untuk memperoleh kekuasaan politik dan merebut kedudukan politik secara konstitusional untuk melaksanakan kebijaksanaan mereka serta memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945.

Dalam sistem politik demokrasi, partai politik berfungsi sebagai pemandu berbagai kepentingan, kemudian memperjuangkannya melalui proses politik dengan terlebih dahulu berupaya mencari dan mempertahankan kekuasaan melalui pemilihan umum.

Partai politik dinegara demokrasi juga melakukan fungsi sosialisasi yang dilakukan oleh partai politik, tetapi bukan dengan indotrinasi sebagaimana yang dilakukan oleh partai politik. Beberapa ilmuwan politik mendefinisikan partai politik sebagai berikut :

1. Max Weber dalam Firmanzah (2008:66) dalam buku berjudul Partai Politik Teori dan Praktik di Indonesia, partai politik didefinisikan sebagai organisasi politik yang bertujuan untuk membawa pemimpinnya berkuasa dan memungkinkan para pendukungnya (politisi) untuk mendapatkan keuntungan dari dukungan tersebut.
2. Carl J. Friedrich dalam buku Miriam Budiardjo (2008:404), dalam buku berjudul Dasar Dasar Ilmu Politik, partai politik adalah sekelompok manusia yang terorganisir secara stabil dengan tujuan merebut atau

mempertahankan penguasaan terhadap pemerintahan bagi pimpinan partainya dan berdasarkan penguasa ini, memberikan kepada anggota partainya kemanfaatan materil dan spirituil

3. Giovanni Sartoni dalam buku Miriam Budiardjo (2008:404) dalam buku berjudul Dasar Dasar Ilmu Politik, mendefinisikan partai politik adalah suatu kelompok yang mengikuti pemilihan umum dan melalui pemilihan umum itu mampu menempatkan calon-calonnya untuk menduduki jabatan-jabatan politik.
4. Lapalombara dan Weiner dalam Alfian (1991:307) dalam buku berjudul Komunikasi Politik dan Sistem Politik Indonesia mengatakan bahwa partai politik adalah organisasi yang mempunyai kegiatan yang berkesinambungan, artinya masa hidupnya tak bergantung pada masa jabatan atau masa hidup para pemimpinnya.

Dari beberapa definisi di atas, partai politik dapat diartikan sebagai suatu organisasi yang memiliki kesamaan ideologi dan visi misi. Partai Politik juga memiliki pencapaian tujuan dalam hal menguasai struktur politik dalam pemerintahan suatu negara melalui mekanisme pemilihan umum yang demokratis. Tujuan partai politik terletak juga pada pengawasan tanpa mengesampingkan perebutan kekuasaan dari penguasa partai politik lainnya. Hal tersebut melalui penempatan anggota anggota partainya yang memenangi pemilihan umum parlemen.

Dalam Undang Undang Nomor 2 tahun 2011 tentang Partai Politik Pasal 10 dijelaskan bahwa tujuan partai politik yaitu

Tujuan umum Partai politik :

- a. Mewujudkan cita-cita nasional bangsa Indonesia sebagaimana dimaksud dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945
- b. Menjaga dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia
- c. Mengembangkan kehidupan demokrasi berdasarkan Pancasila dengan menjunjung kedaulatan rakyat dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia
- d. Mewujudkan kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia

Tujuan khusus Partai politik

- a. Meningkatkan partisipasi politik anggota dan masyarakat dalam rangka penyelenggaraan kegiatan politik dan pemerintahan.
- b. Memperjuangkan cita-cita partai politik dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.
- c. Membangun etika dan budaya politik dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.

Dengan meluasnya gagasan bahwa rakyat harus diikuti sertakan dalam proses politik, partai politik telah lahir dan berkembang menjadi penghubung penting antara rakyat dan pemerintah. Bahkan partai politik dianggap sebagai perwujudan atau lambang negara modern. Oleh karena itu hampir semua negara demokrasi maupun komunis, negara maju maupun negara berkembang termasuk Indonesia memiliki sejumlah partai politik.

Namun bentuk dan fungsi partai politik diberbagai negara berbeda satu dan lain sesuai dengan sistem politik yang diterapkan di negara itu. Gagasan mengenai partisipasi politik rakyat melalui partai politik di negara-negara yang menerapkan sistem politik demokrasi terutama Indonesia, memiliki dasar budaya politik dan ideologi yang kuat bahwa rakyat berhak ikut serta menentukan seseorang yang akan menjadi pemimpin mereka dan menentukan kebijakan umum yang mempengaruhi kehidupan mereka.

2. Pendidikan Politik

Pendidikan politik ialah suatu proses yang mengajarkan kepada masyarakat mengenai nilai-nilai, norma-norma serta simbol-simbol politik melalui media berupa sekolah, pemerintah, dan juga partai politik. Proses pendidikan politik dapat dilakukan melalui kegiatan kursus, latihan kepemimpinan, diskusi dan seminar serta keikutsertaan dalam forum pertemuan. Selain itu, pendidikan politik juga diperlukan untuk menunjukkan bagaimana cara berpolitik yang benar, bersaing secara sehat, dan mendidik masyarakat untuk mematuhi aturan.

Berikut ini akan digambarkan proses pendidikan yang diselenggarakan oleh partai politik. Objek dari pendidikan politik tersebut terbagi menjadi dua kelompok, yaitu kelompok pengaruh, kader dan kelompok masyarakat.

a. Materi Pendidikan

Materi yang disampaikan dalam proses pendidikan politik kepada kader dan pengurus partai lebih berorientasi kepada pemantapan dan pengembangan

program partai, peningkatan loyalitas dan dedikasi kader, peningkatan kualitas kemampuan kader untuk dapat berpikir futuristik. Materi yang disampaikan dalam proses pendidikan politik kepada masyarakat meliputi posisi, hak, kewajiban dan tanggung jawab setiap warga negara dalam kehidupan berbangsa dan bernegara dan konstitusi negara

b. Metode pendidikan

Berdasarkan penjabaran materi pendidikan di atas, diketahui bahwa materi pendidikan politik yang disampaikan kepada kader dan pengurus partai maupun masyarakat berbeda. Dalam hal ini metode yang digunakan untuk menyampaikan materi tersebut juga berbeda. Metode yang digunakan untuk menyampaikan materi kepada kader dan pengurus partai adalah penyampaian yang intensif secara langsung untuk membentuk mindset mereka agar memiliki loyalitas dan integritas kepada partainya.

Metode yang digunakan untuk menyampaikan materi kepada masyarakat dapat berupa penyampaian secara langsung maupun tidak langsung. Namun pada praktiknya, penyampaian materi lebih sering digunakan secara tidak langsung, misalnya menggunakan media massa sebagai perantara.

c. Tujuan Pendidikan

Tujuan partai politik memberikan pendidikan politik bagi kader dan pengurus partai adalah untuk meningkatkan solidaritas politik dalam menjaga dan memelihara integritas bangsa, memberikan pengetahuan tentang tugas, fungsi, hak dan kewajiban partai politik, serta untuk meningkatkan kualitas dan kapasitas kader dan pengurus partai.

Tujuan partai politik memberikan pendidikan politik bagi

masyarakat adalah untuk meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap hak dan kewajibannya dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Diharapkan dengan diselenggarakannya pendidikan politik tersebut akan meningkatkan partisipasi politik dari kader dan pengurus serta masyarakat.

R. Hajer mendefinisikan pendidikan politik adalah usaha membentuk manusia menjadi partisipan yang bertanggung jawab dalam politik (Kartono, 1989 : 14). Pendidikan politik merupakan aktivitas yang terorganisir dan efektif yang dilakukan secara sengaja dan sistematis untuk membentuk individu agar mampu menjadi partisipan yang bertanggung jawab secara etis/moral dalam mencapai tujuan-tujuan politik. Pendidikan politik merupakan pendidikan orang dewasa dengan jalan menyiapkan kader-kader untuk pertarungan politik dan mendapatkan kemenangan dalam perjuangan politik. Lewat pendidikan politik orang berusaha melakukan pembentukan pribadi yang demokratis (*demokratische persoonsvorming*), disamping usaha demokratisasi dari struktur kemasyarakatannya.

Menurut Alfian dalam bukunya yang berjudul Komunikasi Politik dan Sistem Politik Indonesia definisi pendidikan politik adalah usaha yang sadar untuk mengubah proses sosialisasi politik masyarakat sehingga mereka memahami dan menghayati betul-betul nilai-nilai yang terkandung dalam suatu sistem politik yang ideal yang hendak dibangun. Hasil dari penghayatan itu akan melahirkan sikap dan tingkah laku politik baru yang mendukung sistem politik yang ideal itu, dan bersamaan

denganitu lahir pula kebudayaan politik baru.Melalui pendidikan politik diharapkan pula adanya perubahan sikap; yaitu dari apatisisme dan kepasifan, beralih menjadi sikap aktif, penuh inisiatif, maju, dan demokratis. Setiap warga negara seharusnya turut membangun masyarakat dan negaranya, yang dilakukan bersamadengan pemerintah. Warga negara juga aktif dalam usaha mendinamisir dan merenovasi lembaga masyarakat, dan sistem politiknya. Hal ini sangat perlu untuk melawan sisa-sisa birokratisasi yang terlalu ketat/overbirokratisasi, teknokrasi otoriter, dan tirani personal dari penguasa. Disamping itu pendidikan politik bisa memberi sumbangan bagi proses demokrasi yang lebih maju dari segenap lapisan masyarakat, dengan menggunakan prinsip-prinsip yang realistis dan manusiawi.

BAB II

GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN

2.1 Profil Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan

2.1.1 Sejarah Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan

Bahwa PDI Perjuangan merupakan partai politik yang sebenarnya adalah partai yang secara langsung memiliki tali kesejarahan dengan partai politik masa orde lama. PDI Perjuangan sebenarnya kelanjutan dari Partai Demokrasi Indonesia yang berdiri pada tanggal 10 Januari 1973. Partai Demokrasi Indonesia itu lahir dari hasil fusi 5 (lima) partai politik. Kelima partai politik tersebut yaitu :

1. Partai Nasional Indonesia (PNI) PNI didirikan Bung Karno tanggal 4 Juli 1927 di Bandung. Dengan mengusung nilai-nilai dan semangat nasionalisme, PNI kemudian berkembang pesat dalam waktu singkat. Karena dianggap berbahaya oleh penguasa kolonial, tanggal 29 Desember 1929 semua kantor dan rumah pimpinan PNI digeledah. Bung Karno, Maskun, Supriadinata dan Gatot Mangkupraja ditangkap. Berdasarkan keputusan yang ditetapkan Raad van Justitie tanggal 17 April 1931, mereka dipidana penjara.

2. Partai Kristen Indonesia (Parkindo) Parkindo adalah partai yang didirikan karena ada maklumat pada waktu itu, ia baru berdiri tahun 1945 tepatnya pada tanggal 18 November 1945 yang diketuai Ds Probowinoto. Parkindo merupakan penggabungan dari partai-partai Kristen lokal seperti PARKI (Partai Kristen Indonesia) di Sumut, PKN (Partai Kristen Nasional) di Jakarta dan PPM (Partai Politik Masehi) di Pematang Siantar.

3. Partai Katolik Partai Katolik lahir kembali pada tanggal 12 Desember 1945 dengan nama PKRI (Partai Katolik Republik Indonesia) merupakan kelanjutan dari atau sempalan dari Katolik Jawi, yang dulunya bergabung dengan partai Katolik. Sebenarnya partai ini pada tahun 1917-an itu sudah ada. Partai ini berdiri pada tahun 1923 di Yogyakarta yang didirikan oleh umat Katolik Jawa yang diketuai oleh F.S. Harijadi kemudian diganti oleh I.J. Kasimo dengan nama Pakepalan Politik Katolik Djawi (PPKD). Pada Pemilu 1971 Partai Katolik meraih 606.740 suara (1,11%) sehingga di DPR mendapat 3 kursi.

4. Ikatan Pendukung Kemerdekaan Indonesia (IPKI) IPKI atau Ikatan

Pendukung Kemerdekaan Indonesia adalah partai yang didirikan terutama oleh tentara. IPKI sejak lahirnya mencanangkan Pancasila, semangat proklamasi dan UUD 1945 sebagai cirinya. Tokoh dibalik pendirian IPKI adalah AH. Nasution, Kol Gatot Subroto dan Kol Azis Saleh. Kelahirannya didasari oleh UU No. 7 tahun 1953 tentang Pemilu 1955. Dalam pemilu itu anggota ABRI aktif dapat dipilih melalui pemilu dan duduk di Konstituante.

5. Murba, Murba didirikan pada tanggal 7 November 1948 setelah Tan Malaka keluar dari penjara. Murba adalah gabungan Partai Rakyat, Partai Rakyat Jelata dan Partai Indonesia Buruh Merdeka. Menurut data Kementerian Penerangan RI tentang "Kepartaian di Indonesia" seri Pepora No. 8, Jakarta, 1981, istilah Murba mengacu pada pengertian "golongan rakyat yang terbesar yang tidak mempunyai apa-apa, kecuali otak dan tenaga sendiri". Asas partai ini antifasisme, anti imperialisme-kapitalisme dengan tujuan akhirnya mewujudkan masyarakat sosialisme. Meski program Murba membela rakyat kecil dan kaum tertindas, dukungan riil rakyat terhadap Murba kurang begitu kuat.

2.1.2 Visi dan Misi PDI Perjuangan

Visi Partai adalah keadaan pada masa depan yang diidamkan oleh Partai, dan oleh karena itu menjadi arah bagi perjuangan Partai. Berdasarkan amanat pasal 6 Anggaran Dasar Partai PDI Perjuangan adalah :

1. Terwujudnya cita-cita Proklamasi Kemerdekaan 17 Agustus 1945 sebagaimana dimaksud dalam Pembukaan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

2. Terwujudnya masyarakat Pancasila dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia yang demokratis adil dan makmur

Misi partai adalah muatan hidup yang diemban oleh partai, sekaligus menjadi dasar pemikiran atas keberlangsungan eksistensi partai, sebagaimana diamanatkan dalam pasal 7,8 dan 9 Anggaran Dasar Partai, yaitu :

1. Menghimpun dan memperjuangkan aspirasi rakyat sebagai arah kebijakan politik partai.
2. Memperjuangkan kebijakan politik Partai menjadi kebijakan politik penyelenggaraan negara.
3. Menghimpun, membangun dan menggerakkan kekuatan rakyat guna membangun masyarakat Pancasila.
4. Menghimpun, merumuskan dan memperjuangkan aspirasi rakyat dalam merumuskan dan menetapkan kebijakan negara.
5. Memperjuangkan kepentingan rakyat dibidang ekonomi, social dan budaya secara demokratis.
6. Berjuang mendapatkan kekuatan politik secara konstitusional guna mewujudkan pemerintahan yang melindungi segenap bangsa Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa serta ikut melaksanakan ketertiban dunia.
7. Membentuk dan membangun karakter bangsa.
8. Mendidik dan mencerdaskan rakyat agar bertanggung jawab menggunakan hak dan kewajibannya sebagai warga negara.
9. Melakukan komunikasi politik dan partisipasi politik warga Negara.
10. Mempertahankan dan mewujudkan cita-cita Negara Proklamasi 17

Agustus 1945 di dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia

11. Melaksanakan, mempertahankan dan menyebarluaskan Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa.
12. Mempersiapkan kader partai dalam pengisian jabatan politik dan jabatan public melalui mekanisme demokrasi, dengan memperhatikan kesetaraan dan keadilan jender.

BAB III

PENDIDIKAN POLITIK BAGI KADER OLEH PDI PERJUANGAN PROVINSI RIAU TAHUN 2015-2016

Partai politik merupakan sebuah organisasi untuk memperjuangkan nilai atau ideologi tertentu melalui penguasaan struktur kekuasaan dan kekuasaan tersebut diperoleh melalui keikutsertaan dalam pemilihan umum. Pada konteks ini partai politik merupakan sebuah organisasi yang berkerja didasarkan prinsip-prinsip tertentu seperti adanya sebuah kepemimpinan dan keanggotaan, devisionalisasi dan spesifikasi, melakukan perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan dan Kontrol serta adanya aturan main yang mengatur perilaku anggota dan organisasi

Partai politik juga merupakan instrument perjuangan nilai atau ideologi. Ideologi yang dianut ini berfungsi sebagai pemandu perilaku partai dalam menjalankan fungsi-fungsinya. Perjuangan partai seperti yang telah disebutkan diatas adalah melalui penguasaan struktur kekuasaan. Dengan demikian, partai sesungguhnya adalah sebuah identitas yang berorientasi pada kekuasaan, yaitu untuk mendapatkan, mempertahankan, memperluas kekuasaan dan mengelola kekuasaan. Yang harus dicatat adalah kekuasaan tersebut disebut dalam rangka implementasi nilai atau ideologi yang

mengikat partai, bukan semata-mata mengejar kekuasaan

Kewajiban partai politik dalam menjalankan fungsi pendidikan politik juga sesuai dengan apa yang telah dijabarkan oleh Afan Gaffar dan Ichlasul Amal, bahwa pendidikan politik yang dilakukan partai politik selain kepada anggota dan diperuntukkan untuk seluruh warga negara berupa pendidikan kewarnegaraan dan kebangsaan. Sederhananya, pendidikan politik internal bertujuan untuk meningkatkan kualitas kader partai dalam menghadapi situasi politik yang berkembang.

3.1 Pendidikan Politik Internal PDI Perjuangan Provinsi Riau Tahun 2015-2016

Provinsi Riau merupakan salah satu Provinsi yang tidak terlepas dari jangkauan eksistensi PDI Perjuangan. Pada perkembangannya pendidikan politik yang dilakukan oleh PDI Perjuangan Provinsi Riau, yang berada dalam cakupan wilayah Dewan Pimpinan Daerah (DPD) PDI Perjuangan Provinsi Riau lebih banyak dilakukan terhadap pendidikan politik internal partai. Artinya proses pelaksanaan pendidikan politik tersebut hanya berorientasi terhadap penguatan internal partai, peningkatan loyalitas kader dan pengurus partai, serta pengembangan kemampuan dan potensi kader serta pengurus partai untuk dapat berpikir futuristik demi masa depan yang terus berlangsung. Hal ini dibuktikan dengan pernyataan yang dikemukakan oleh Kordias Pasaribu, SH, M.Si selaku ketua DPD PDI Perjuangan Provinsi Riau dalam sebuah wawancara bersama penulis di kantor DPD PDI Perjuangan Provinsi Riau, beliau mengutarakan bahwa

“pendidikan politik yang PDI Perjuangan lakukan saat ini memang terfokus terhadap satu sektor, yakni kader beserta fungsionaris. namun

untuk saat ini PDI Perjuangan Provinsi Riau masih berbenah untuk menciptakan kader kader yang berhasil di setiap daerah Provinsi Riau, dan pada saat ini juga partai masih berorientasi kepada pendidikan politik untuk kader partai yang tujuannya untuk menguatkan kepengurusan partai. Hal ini seperti diketahui bersama, bahwa PDI Perjuangan merupakan partai yang sudah lama berkecimpung di dunia politik Indonesia untuk selalu mencapai apa yang diinginkan” **(Hasil Wawancara Penulis dengan Kordias Pasaribu pada tanggal 19 januari 2017)**

Menurut pernyataan salah satu kader DPD PDI Perjuangan Provinsi Riau tersebut, pendidikan politik yang bersifat internal ini dilakukan untuk penguatan internal PDI Perjuangan, yang mana PDI Perjuangan sendiri merupakan salah satu partai yang sudah lama berkecimpung di dunia politik Indonesia dan PDI Perjuangan provinsi riau masih berbenah internal partai dalam menyongsong visi dan misi yang telah dicanangkan oleh partai. Pada kesempatan lain, Dra Nining Viveriani selaku wakil ketua bidang kaderisasi dan ideologi Dewan Pimpinan Daerah (DPD) PDI Perjuangan Provinsi Riau mengutarakan kepada penulis bahwa :

“Dewasa ini masyarakat Indonesia khususnya masyarakat Provinsi Riau cenderung apatis terhadap kondisi partai yang ada. Dan seharusnya tugas partai untuk dapat mencerdaskan dan membenahi kehidupan politik, tersebut. Saat ini, PDI Perjuangan telah melakukan pendidikan politik baik kepada kader serta pengurus partai. Pendidikan politik tersebut ke dalam program atau agenda partai yang duduk di Legislatif agar menjalankan

*funksinya secara maksimal, serta membuat diskusi diskusi public terkait peranan partai politik dalam memperjuangkan aspirasi masyarakat, sehingga nantinya dapat membentuk sikap dan karakter politik dan siap untuk mendukung program partai dalam memajukan Indonesia ke arah lebih baik lagi.” **(Hasil wawancara Penulis dengan Dra Nining Viveriani Pada tanggal 27 Januari 2017)***

3.1.1 Pelatihan Kader PDI Perjuangan Provinsi Riau

Pelatihan Kader PDI Perjuangan Provinsi Riau ini dimaksudkan melatih guru kader untuk persiapan di tahun 2017 DPD PDI Perjuangan Provinsi Riau membuat sekolah legislatif. Tujuan pelatihan kader ini adalah penguatan nilai nilai internal partai, agar kedepannya program program atau langkah langkah yang diambil oleh PDI Perjuangan Provinsi Riau, melalui kader kadernya selaras dengan agenda Restorasi Indonesia yang menjadi tujuan utama partai. Menurut Kordias Pasaribu selaku Ketua Dewan Pimpinan Daerah (DPD) PDI Perjuangan Provinsi Riau, pelatihan kader ini diselenggarakan untuk seluruh kader partai baik yang berada pada roda pemerintahan eksekutif, legislatif, ataupun pada bidang-bidang lainnya dalam proses penyelenggara negara.

Materi yang diberikan antara lain terkait dengan ideologi partai, visi dan misi serta program partai, ideologi negara, konstelasi politik nasional dan global, lembaga lembaga negara beserta hubungannya. Dalam artian luas, pelatihan kader ini mencakup banyak hal seperti kondisi politik, ekonomi, sosial-budaya, serta pertahanan dan keamanan. Pelatihan kader itu sendiri dilakukan secara berjenjang, mulai dari jenjang bawah, menengah dan lanjutan.

Setiap jenjang akan ada penilaian dan sertifikat sebagai bukti telah menjalankan pendidikan politik secara internal yakni proses pelatihan kader.

Seperti yang dikemukakan oleh Willy Aditya, langkah terpenting setelah adanya kepengurusan adalah pembangunan sistem rekrutmen kader. Rekrutmen tersebut harus memenuhi hukum kuantitas dan kualitas. Awalnya, rekrutmen dilakukan dengan mengejar target kualitas atau besaran angka tertentu. Hal itu penting, mengingat jalur kontestasi kekuasaan yang dipilih PDI Perjuangan adalah jalur elektoral, yang tentunya tidak dapat dipisahkan dengan takdir partai politik sebagai wadah untuk mencari dan mempertahankan kekuasaan. Pada tahap tersebut, tidak dapat dipungkiri pula bahwa kualitas dukungan menjadi penentu kemenangan.

Tentu saja kualitas itu hanya akan menjadi catatan statistik semata tanpa bekal kesadaran politik yang memadai. Oleh karena itu, PDI Perjuangan juga melakukan berbagai upaya pembentukan karakter bagi kader kadernya. Upaya tersebut dilakukan melalui pendidikan-pendidikan dan pelatihan hingga proses penempatan melalui kerja-kerja organisasi. Pelatihan kader atau sekolah kader ini menjadi salah satu langkah yang dibangun oleh Dewan Pimpinan Daerah (DPD) PDI Perjuangan Provinsi Riau dalam mewujudkan hal tersebut. Harapan dengan diadakannya pelatihan kader ini adalah dapat menciptakan kader-kader partai yang memiliki loyalitas serta kualitas dalam mengabdikan kepada partai dan masyarakat Provinsi Riau khususnya, sesuai amanat Undang-Undang dan Anggaran Dasar-Anggaran Rumah Tangga (AD-ART) PDI Perjuangan.

Melalui data yang penulis dapatkan, Pelatihan kader PDI Perjuangan Provinsi Riau dilakukan pada 17 Desember 2016. Bertempat di kantor Dewan Pimpinan Daerah

(DPD) dengan jumlah peserta 22 orang dari perwakilan wakil ketua kaderisasi dan ideologi se-Provinsi Riau. Sedangkan narasumber atau pemateri dari pelatihan kader yakni guru kader yang pernah mengadakan pelatihan kader di kota Yogyakarta pada tahun 2012.

3.1.2 Rapat Kerja Daerah (Rakerda) Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan

Rapat kerja daerah ini dilakukan pada tanggal 13 Januari 2016 yang bertempat di Hotel Ratu Mayang Garden Pekanbaru dengan jumlah peserta 160 orang. Peserta yang ada terdiri dari pengurus Dewan Pimpinan Cabang (DPC) setiap kabupaten serta Dewan Pimpinan Ranting (DPRt) setiap kecamatan yang ada di Provinsi Riau. Kegiatan ini berdasarkan laporan pertanggungjawaban penggunaan dana bantuan yang diberikan oleh pemerintah Provinsi Riau, termasuk dalam agenda atau proses pelaksanaan pendidikan politik. Hal ini apabila dianalisa berdasarkan Permendagri Nomor 36 Tahun 2010 pasal 6, dapat dikategorikan sebagai proses pendidikan politik, yang proses penyampaian dilakukan melalui bimbingan teknis.

3.1.3 Upgrading pengurus Dewan Pimpinan Daerah PDI Perjuangan Provinsi Riau

Upgrading pengurus PDI Perjuangan Provinsi Riau dilakukan bersamaan dengan pelantikan pengurus PDI Perjuangan periode tahun 2015-2020 yang bertempat di Hotel Aryaduta Pekanbaru dan dihadiri oleh para pengurus Dewan Pimpinan Daerah (DPD) PDI Perjuangan Provinsi Riau. Proses upgrading merupakan salah satu proses bimbingan teknis guna

menyelaraskan mindset (pola pikir) serta culture set (budaya bertindak) masing masing pengurus dalam menjalankan program kegiatan partai sesuai dengan visi dan misi yang telah ditetapkan.

Proses upgrading pengurus DPD PDI Perjuangan Provinsi Riau ini merupakan bentuk pelaksanaan pendidikan politik internal partai yang pertama di kepengurusan periode tahun 2015-2020. Hal ini seperti data yang penulis peroleh, bahwa dalam laporan kegiatan yang ada, proses *upgrading* pengurus termasuk kegiatan dalam arsip kegiatan pendidikan politik internal partai dengan materi yang diberikan adalah terkait visi misi partai, tata kelola pemerintahan yang baik dan efektif, serta pengamalan nilai-nilai Pancasila serta Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Hal ini juga selaras dengan yang telah ditetapkan oleh Pemendagri Nomor 36 Tahun 2010 terkait materi dan metode pendidikan politik yang diberikan oleh partai politik terhadap para kader serta pengurus partai. Untuk rincian anggaran atau pengeluaran pada proses kegiatan *upgrading* ini tidak dapat penulis sertakan. Hal ini disebabkan, untuk rincian anggaran di tahun 2015 laporan pertanggungjawaban terhadap agenda atau kegiatan pendidikan politik PDI Perjuangan belum diselesaikan proses penyusunannya.

3.2 Pendidikan Politik Eksternal Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Provinsi Riau Tahun 2015-2016

Sesuai amanat Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011, Partai Politik wajib menyelenggarakan pendidikan politik kepada masyarakat secara luas. Hal ini telah jelas diatur pada BAB XIII Tentang Pendidikan Politik pasal 31. Menurut undang-undang tersebut, pendidikan politik kepada masyarakat bertujuan untuk :

- a. Meningkatkan kesadaran hak dan kewajiban masyarakat dalam

kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.

- b. Meningkatkan partisipasi politik dan inisiatif masyarakat dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.
- c. Meningkatkan kemandirian, kedewasaan, dan membangun karakter bangsa dalam rangka memelihara persatuan dan kesatuan bangsa.

Hal ini juga telah dijelaskan pada Anggaran Dasar Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan bahwa PDI Perjuangan melakukan pendidikan politik secara eksternal. Pendidikan politik eksternal merupakan pendidikan politik yang direalisasikan kepada masyarakat, yang dalam penelitian ini merujuk kepada masyarakat Provinsi Riau khususnya di Kota

Pekanbaru. Pendidikan politik eksternal yang dilakukan kepada masyarakat khususnya di Kota Pekanbaru ini merupakan pendidikan politik dengan materi yang diberikan meliputi posisi, hak, kewajiban dan tanggungjawab setiap warga negara dalam kehidupan berbangsa, dan bernegara dan tentunya konstitusi negara.

Dalam Pemendagri Nomor 36 tahun 2010, pendidikan politik dan partai politik terhadap masyarakat dapat dilakukan dengan metode seminar, lokakarya, pelatihan, asistensi, sosialisasi dalam bentuk jalan sehat dan kegiatan pagelaran seni serta bentuk lainnya yang tidak bertentangan dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945. Sedangkan materi yang disampaikan terdapat didalam dua kategori, yakni materi wajib dan materi pilihan.

Materi wajib meliputi Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dengan tujuan untuk meningkatkan pemahaman serta pengamalan

didalam kehidupan bermasyarakat. Untuk materi pilihan dapat berupa materi Demokrasi, Pendidikan Kewarnegaraan atau Kebangsaan, Kebijakan public, serta materi lainnya yang tidak bertentangan dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Kegiatan yang dilakukan itu adalah :

Diskusi Publik Tentang Peranan Partai Politik sebagai penyambung aspirasi warga`

Kegiatan ini dilakukan pada tanggal 24 Maret 2016 yang bertempat di rumah Ketua Dewan Pimpinan Cabang (DPC) PDI Perjuangan Kecamatan Payung Sekaki. Jumlah peserta yang mengikuti kegiatan ini mencapai 75 orang mulai dari pengurus DPD, DPC serta DPRt PDI Perjuangan khususnya di Kota Pekanbaru. Diskusi public ini bertujuan untuk memberikan pendidikan politik bagi masyarakat bahwa PDI Perjuangan sudah membuka akses seluas-luasnya dalam menampung aspirasi masyarakat guna mengawal demokrasi yang intinya merupakan pemerintahan dari rakyat dan untuk rakyat.

Pada kegiatan ini narasumber atau pemateri langsung dari pengurus DPD PDI Perjuangan Provinsi Riau. Inti dari yang disampaikan pada proses penyelenggaraan pendidikan politik ini, masyarakat diajak untuk mengenal demokrasi dan mengetahui bahwa partai merupakan salah satu ujung tombak demokrasi dalam memperjuangkan aspirasi masyarakat dalam sebuah proses penyelenggaraan negara

Untuk kegiatan pendidikan politik kepada masyarakat ini lebih banyak dilakukan secara tidak langsung. Pada konteks ini, PDI Perjuangan Provinsi Riau juga tertolong dengan adanya media baik media massa dan media elektronik dalam pengembangan nilai-nilai yang akan diberikan kepada masyarakat Provinsi Riau.

BAB IV PENUTUP

4.1 Kesimpulan

1. Pendidikan politik yang dilakukan oleh PDI Perjuangan di Provinsi Riau belum optimal, dan masih berorientasi kepada pendidikan politik internal partai, yaitu pendidikan politik itu hanya diberikan untuk anggota serta kader partai misalnya pelatihan kader partai. Sedangkan pendidikan politik untuk masyarakat masih sangat minim dilakukan, masyarakat mengerti tentang pendidikan politik hanya lewat media massa atau media elektronik.

2. Realisasi pendidikan politik untuk masyarakat Provinsi Riau masih mengalami beberapa hambatan, yakni ketergantungan anggota atau kader partai terhadap masa reses yang dilaksanakan oleh kader PDI Perjuangan yang duduk di DPRD sehingga banyak anggota atau kader partai beranggapan bahwa dengan masa reses tersebut pendidikan politik untuk masyarakat juga telah terselenggara. Hambatan lainnya yakni keterbatasan anggaran partai yang dapat dialokasikan untuk pendidikan politik bagi masyarakat Provinsi Riau

4.2 Saran

1. Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan seharusnya dapat memberikan reward and punishment serta kontrol terhadap kader partai yang telah dapat memberikan pendidikan politik kepada masyarakat Provinsi Riau, dengan melakukan perangkingan terhadap kinerja partai politik, kemudian hasilnya akan disebarluaskan, sehingga masyarakat dapat menilai mana partai politik yang menjalankan fungsi dan tugasnya secara baik dan yang tidak baik sehingga dapat menjadi pertimbangan bagi masyarakat dalam proses pemilihan umum yang akan dilaksanakan.

2. Membangun kerja sama terhadap seluruh anggota partai hingga ke struktur terendah agar terus bersinergi dengan agenda pendidikan politik untuk masyarakat secara berkelanjutan dengan demikian dapat merubah paradigma atau mind set dari masyarakat itu sendiri bahwa PDI Perjuangan tidak hanya datang kepada masyarakat ketika pemilu akan dilaksanakan tetapi juga mengoptimalkan bantuan politik yang diberikan oleh pemerintah dalam melaksanakan pendidikan politik untuk masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Agustino, Leo. 2009 *Plikada Dan Dinamika politik lokal*. Yogyakarta PustakaBelajar
- Amal, Ichlasul. 1988. *Teori-Teori Mutakhir Partai Politik*. yogyakarta PT Tiara Wacana Yogya
- Alfian. 1991 *Komunikasi Politik dan Sistem Politik Indonesia*. Jakarta PT Gramedia Pustaka Utama
- Bagong, Suyanto. 2010. *Metode Penelitian Sosial*. Jakarta Kencana
- Budiardjo, Miriam. 2009 *Dasar Dasar Ilmu Politik*. Jakarta PT Gramedia Pustaka Utama
- Haris, Syamsuddin. 2014. *Partai, Pemilu Dan Parlemen Era Reformasi*. Jakarta Pustaka Obor
- Husaini Usmandan Purnomo Setiady Akbar. 2011. *Metode Penelitian Sosial*. Jakarta Bumi Aksara
- Labolo, Muhadam. 2015. *Partai Politik Dan Sistem Pemilihan Umum Di Indonesia Teori dan konsep danIsu*

Strategis. Jakarta PT. Raja Grafindo Persada

- Marzuki M.M 2002. *Metodologi Riset*. Yogyakarta PT Prasetya Widya Pratama
- Mukthie Fadjar, Abdul 2013. *Partai Politik Dalam Perkembangan Ketatanegaraan Indonesia*. Malang. Setara Press (Kelompok Penerbit Intrans)
- Muliansyah A. Ways. 2015. *Political : Ilmu Politik, Demokrasi, Partai Politik A welfare State*. Yogyakarta Buku Litera
- Pamungkas, Sigit. 2012. *Partai Politik :Teori dan Praktik di Indonesia*. Yogyakarta Institute for Democracy and Welfarism
- Patilima, Hamid. 2011. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung. Alfabeta
- Prof. Dr. Husaini Usman, M.Pd, M.T. dan Purnomo Setiady Akbar, M.Pd 2011. *Metode Penelitian Sosial*. Jakarta Bumi Aksara
- Surbakti, Ramlan. 2010. *Memahami Ilmu Politik* Jakarta PT. Grasindo.
- Samah, Kristin. 2014 *Megawati dalam catatan wartawan*. Jakarta PT Gramedia Pustaka Utama
- Yudawibawa, Yogi. 2009. *Soekarno sebuah biografi politik*. Bandung Bumi Aksara

Jurnal

- Medelina K. Hendytio dkk. *Kebijakan Tentang Akses Dan Informasi Serta Informasi Publik Dalam Proses Legislasi*. Dalam Analisis CSIS

“Representasi Dan Partisipasi Publik Dalam Demokrasi. Jakarta CSIS. Volume 41 Nomor 4 Desember 2012

Dalam Jurnal Online Ayub Budi Prayoga. Peran Partai Politik Dalam memberikan Pendidikan Politik Kepada Masyarakat Di Kabupaten Gresik. Diakses pada tanggal 20 april 2017 pukul 13.49 WIB

Jurnal Online Mahasiswa Universitas Pembangunan Nasional. Adi Soeprapto. Komunikasi Dalam Proses Pendidikan Politik Pemilih Pemula Dalam Pemilihan Umum 2014 di DIY. Diakses pada tanggal 19 februari 2017 pukul 17.00 WIB

Skripsi Ahmad Syaiful Ashar 2011. Pelaksanaan Pendidikan Politik Oleh DPD Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Kabupaten Semarang. Diakses melalui jurnal online pada 19 februari 2017 pukul 20.44 WIB

Fasilitasi penyelenggaraan Pendidikan Politik

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2014 Tentang Pedoman Tata Cara Perhitungan, Penganggaran Dalam APBD, Dan Tertib Administrasi Pengajuan Penyaluran dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik

Web

<https://www.pdiperjuangan.id/visimisidiakse> pada 11 Desember 2016 pukul 21.50 WIB

<https://www.pdiperjuangan.org> diakses pada 11 Desember 2016 pukul 21.47 WIB

<https://riaupos.co/47110-arsip-golkar-raih-7-kursi-di-kota-pekanbaru>
<http://V1cDUv19724> diakses pada 11 januari 2017 pukul 17.09

Dokumen

Dokumen Anggaran Dasar-Anggaran Rumah Tangga PDI Perjuangan yang diterbitkan oleh Dewan Pimpinan Pusat PDI Perjuangan

Peraturan Perundang – Undangan

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2010 Tentang Pedoman